

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktek kerja profesi (PKP) di apotek kimia farma 459 disimpulkan bahwa:

1. Apotek merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian bagi apoteker untuk memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab sebagai tenaga yang professional.
2. Seorang apoteker di apotek harus memiliki tanggung jawab manajerial dan tanggung jawab secara pelayanan kefarmasian. Tanggung jawab manajerial yaitu mulai dari perencanaan barang, pengadaan barang, penerimaan barang, penyimpanan barang serta pelaporan obat. Sedangkan tanggung jawab pelayanan kefarmasian yaitu memastikan obat yang diterima oleh pasien sudah tepat dan rasional.
3. Apoteker harus mampu menjadi *nine stars pharmacist*, yaitu sebagai *care-giver, decision maker, communicator, leader, manager, life-longlearner, teacher, researcher* dan *entrepreneur* dengan tetap menjunjung kode etik profesinya.
4. Apoteker diwajibkan untuk memiliki wawasan yang luas serta berkompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas kefarmasian secara professional.
5. Dengan adanya PKPA di Apotek kimia farma telah memberikan pengetahuan, pengalaman, keterampilan bagi calon apoteker serta mengetahui sistem manajerial di apotek, mulai dari pengadaan obat, penerimaan, penataan, peracikan,

penyimpanan, serta pelaporan) serta memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik pelayanan resep maupun non resep, beserta dengan pemberian KIE kepada pasien.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 459 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari– 17 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKPA calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Sebagai calon apoteker harus mampu dan berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA supaya memperoleh informasi dan pengalaman yang sesungguhnya untuk menerapkan tugas pelayanan kefarmasian.
3. Pemahaman untuk komposisi obat beserta fungsinya perlu ditingkatkan lagi. Mengingat banyak sekali nama dagang obat yang komposisinya hampir sama berdasarkan kelas terapinya. Sebaiknya memahami obat generik terlebih dahulu sebelum masuk ke obat paten.
4. Pemberian KIE kepada pasien harus lebih ditingkatkan lagi. Pemberian KIE tidak hanya sekedar memberitahukan

tujuan dan cara penggunaan obat. Lebih dari itu, Apoteker harus menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, Apoteker juga harus memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping obat, waktu penyimpanan pada obat racikan dan cara penyimpanan obat.

5. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempunyai kemampuan kerja sama dengan semua karyawan di apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, **ISO Informasi Spesialite Obat Indonesia**, 2016, Penerbit Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Anonim, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi**, 2017, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Boyd RA, Stern RH, Stewart BH, et al, 2000, "*Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-mediated secretion.*" *J Clin Pharmacol* 40: 91-8.
- Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 2006, Heart-Related Syndromes Down Syndrome (Trisomy 21), viewed on 11 April 2009.
- Daphne T. Hsu, MD and Gail D. Pearson, MD, ScD. 2009. *Heart Failure in Children*.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 193

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Katzung, B.G., 2007, **Basic and Clinical Pharmacology**, 10th ed. McGraw-Hill Companies Inc, Singaporel.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Gilman, A.G., 2010, Goodman & Gilman Manual Farmakologi dan Terapi, alih bahasa, Elin Yulinah Iskandar, Edisi IX, 1156 hlm, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Lacy *et., all.*, 2010, **Drug Information Handbook**, 18th ed., American Pharmacist Association, USA.
- Medscape. 2016. *Medscape: Drug & Diseases*. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Februari 2017.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, 2015, "Pedoman Tatalaksana Gagal Jantung", Edisi Pertama.
- Seto, S., & N. Yunita, 2008, *Manajemen Farmasi*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi ed. 3*, Airlangga University Press, Surabaya.